



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)  
**UNIT KERJA** : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : WAHYU DWI SUGIANTO  
2. Jabatan : KEPALA  
3. NHK : 832547

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 210.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA  
TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 29.200.000

1. MOTOR, YAMAHA XEON GT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.  
7.200.000  
2. MOTOR, YAMAHA MX NEW 135 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.  
7.500.000  
3. MOTOR, YAMAHA VIXION OLD Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.  
7.000.000  
4. MOTOR, HONDA NEW MEGAPRO Tahun 2012, HASIL SENDIRI  
Rp. 7.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 86.580.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 25.691.857

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 6.000.000

**Sub Total** Rp. 357.471.857

**III. HUTANG** Rp. 166.478.583

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 190.993.274

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.